

JAGAT KEWARTAWANAN

Oleh Priyambodo RH

PENDAHULUAN

Dua jari kanan, jempol dan telunjuk, Yati (12) terlihat cekatan menjepit sebilah pisau baja untuk memotong selembur karet bakal sol sepatu. Sementara itu, tangan kiri anak kelas satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Cisoka, Tangerang, Jawa Barat, tersebut dengan lincahnya memutar-mutarkan karet sol berpola telapak kaki.

Dari sepenggal pembuka cerita di atas, pernahkah anda memikirkan satu filosofi dari profesi mulia para pembuat sepatu? Sebenarnya, mereka bisa jadi adalah orang-orang yang filosofi profesinya patut menjadi contoh bagi para komunikator, terutama wartawan.

Oleh karena, para pembuat sepatu secara sadar tidak pernah berkarya hanya untuk ukuran kakinya sendiri. Bahkan, mereka sangat memperhatikan kepentingan orang banyak. Dengan kata lain, mereka berkarya dengan "*ukuran kaki*" orang lain, dan tidak semena-mena memaksakan kehendak dengan "*ukurannya sendiri*".

Berangkat dari kesadaran wartawan untuk tidak memakai "*ukuran kaki*" -dalam arti hanya memuaskan egoisme dan kesombongan pribadi-itulah yang nantinya menentukan sejauh mana hasil karya mereka dilihat dari segi mementingkan karya berupa berita maupun karangan khas bagi masyarakat.

Berkaitan dengan hal itu pula, maka sejumlah tips tentang Teknik Mencari Berita/Karangan Khas ini disusun dengan berbagai pembahasan yang mengutamakan banyak faktor yang bisa memperkuat satu karya jurnalistik yang memiliki *Misi* dan *Visi* bagi kepentingan khalayak.

Misi dan *Visi*. Dua kata tersebut merupakan hal terpenting dalam menentukan arah kemana berita dan karangan khas yang akan kita susun mencapai tujuan akhir. Dengan kata lain, *Misi* dan *Visi* juga akan menentukan bagaimana kita memulai mengumpulkan bahan berita dan karangan khas.

Misi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terbitan Balai Pustaka tercatat memiliki tiga pengertian, yang salah satunya -pengertian terakhir-- adalah "*tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya demi agama, ideologi, patriotisme, dsb.*"

Dalam batasan tugas jurnalistik atau kewartawanan, maka *Misi* dapat diartikan sebagai kewajiban wartawan untuk melakukan tugas dengan kepentingan tertentu, antara lain lembaga media massa tempatnya bekerja, dan kepentingan umum. Pada kelanjutannya, misi dapat saja bertambah dengan kewajiban tugas bagi kepentingan bangsa dan negara.

Bagi wartawan Indonesia (anggota Persatuan Wartawan Indonesia/PWI) Misi tersebut termaktub secara jelas dalam Peraturan Dasar PWI pada bagian Pendahuluan yang mencatat: “Bahwa sesungguhnya adalah kenyataan sejarah, perjuangan wartawan Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda hingga sekarang, tak dapat dipisahkan dari perjuangan Rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dalam wadah negara Kesatuan, yang berkeadilan dan berkemakmuran serta diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.”

Pada bagian pendahuluan Peraturan Dasar PWI itu pula tercatat sejumlah Misi lain dari wartawan Indonesia, yaitu:

- Wartawan Indonesia berdiri teguh di atas dasar falsafah Negara Pancasila,
- Berpedoman kepada Pancasila, UUD 1945, dan TAP MPR-RI,
- Sebagai alat demokrasi, Wartawan Indonesia berketetapan hati dan bertekad untuk terus melanjutkan tradisi demokrasi dan patriotiknya.
- Wartawan Indonesia tanpa membedakan aliran politik, asal suku, ras, agama, kepercayaan dan golongan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa/negara.

Sementara itu, **Visi** dalam KBBI tercatat juga memiliki tiga arti yang salah satunya - pengertian pertama- adalah *"kemampuan untuk melihat pada inti persoalan; pandangan; wawasan."*

Oleh karena itu, wartawan yang ber-**Visi** paling tidak harus memiliki kemampuan untuk melihat suatu hal langsung pada inti permasalahan dengan sudut pandang yang jelas dan tepat, serta bertujuan memberikan wawasan kepada khalayaknya.

Kemampuan wartawan untuk mengembangkan **Visi**-nya cenderung dipengaruhi oleh berbagai hal yang berkaitan dengan latar belakang pengalaman atau seringkali disebut *"jam terbang"*, dan kemauannya untuk bersikap *"open minded"* (berpikir terbuka).

BERITA DAN KARANGAN KHAS

Sejauh ini dalil tentang berita dan karangan khas senantiasa beragam pendekatannya, namun semuanya memiliki kesepahaman dalam proses dan hasil kerjanya.

Dalam bahasa yang gamblang, banyak wartawan berpendapat: *"Berita adalah semua hal yang patut dipublikasikan."*

Hal itu dibenarkan pula oleh tiga sekawan dosen Universitas Tennessee (Amerika Serikat) -Julian Harriss, Kelly Leiter, dan Stanley Johnson-dalam buku *"The Complete Reporter"* pada tahun 1985.

Bahkan, mereka merumuskan pula bahwa berita sedikit-dikitnya meliputi:

- menyangkut kepentingan manusia,
- kejadian dari peristiwa,

- memiliki fakta dan pendapat yang menarik perhatian publik,
- kejadian baru atau sesuatu yang menarik untuk diperbarui lagi,
- berbagai hal yang patut mendapat perhatian publik,
- sesuatu yang akurat, terikat waktu, membangkitkan rasa ingin tahu, penuh hal-hal baru dan berdampak terhadap perhatian publik,
- semua hal yang terjadi, yang membangkitkan inspirasi untuk mengehathui apakah hal itu, dan bagaimana hasilnya dari perkembangan hal tersebut,
- gabungan dari semua kegiatan rutin yang menyentuh rasa kemanusiaan, dan menjadi perhatian dari banyak khalayak.

Sementara itu, sejumlah pakar ilmu komunikasi -seperti *Wilbur Schramm* dan *Harold Laswell*, keduanya dari Amerika Serikat- berpendapat bahwa berita sedikit-dikitnya memberikan jawaban terhadap lima unsur "W" -*Who* says *What* at *Where* and *When*, then *Why*- (*siapa* mengatakan *apa*, *dimana* dan *kapan*, kemudian *mengapa*), serta dilengkapi satu unsur "H" alias "*How*" (*bagaimana*).

Dari berbagai pengertian tentang berita seperti di atas, maka setidaknya-tidaknya apa itu berita dapat tergambarkan lebih jelas. Namun demikian, tahap pelaksanaan untuk mencari berita seringkali dianggap bukanlah hal yang mudah. Permasalahan yang sama, bahkan banyak yang menganggapnya sebagai lebih rumit lagi, juga terjadi dalam proses pembuatan karangan khas.

Sebagaimana berita, istilah karangan khas juga memiliki banyak pengertian dari berbagai sudut pandang. Dan, pada hasil akhirnya pengertian karangan khas berada di muara yang sama, yaitu karya jurnalistik yang susunan dasarnya sama dengan berita.

Hanya saja, karangan khas --seperti juga namanya-- memiliki sesuatu yang lebih khas dibanding berita. Oleh karena, *karangan khas merupakan berita yang berkedalaman*. Lebih dalam untuk mengungkapkan latar belakang satu permasalahan. Lebih dalam penuturannya. Lebih dalam informasi yang diungkapkan. Dan, diharapkan lebih dalam memeras rasa kemanusiaan pembaca atau publik pada umumnya.

Bahkan, banyak wartawan yang menyatakan lebih mudah mengungkapkan satu permasalahan pelik dalam bentuk karangan khas dan foto dibanding berita biasa. Kenapa? Oleh karena, karangan khas memuat unsur latar belakang sebagai wujud "*kedalaman*" dari berita yang terkesan informasinya masih sepotong-sepotong.

Dengan kata lain, *berita ibarat makan nasi saja*, sedangkan *karangan khas seperti memakan nasi komplit dengan lauk pauknya*.

Pada kenyataan di lapangan, wartawan dalam tugasnya juga dituntut untuk lebih dahulu menyelesaikan berita, baru kemudian menuliskan karangan khas tatkala informasinya sudah lengkap. Hal ini lebih terlihat jelas bagi wartawan kantor berita.

Kenyataan di lapangan pula yang sering menunjukkan bahwa wartawan --terutama wartawan pemula-- dalam menuangkan gagasannya menghadapi kendala internal, yaitu

kesulitan mencari bahan berita. Namun, begitu banyak mendapatkan bahan berita, ternyata menghadapi kesulitan untuk menuangkannya dalam tulisan. Dan, kesulitan berikutnya adalah upaya untuk mengakhiri penulisan berita. Masalah klasik seperti ini terjadi pula dalam penyusunan karangan khas.

WARTAWAN DAN PELIPUTAN

Dalam sejarah pers sempat tercatat anekdot bahwa Napoleon Bonaparte sebagai Sang Kaisar Kerajaan Perancis, yang juga panglima perang kawakan, mengatakan bahwa dirinya lebih baik menghadapi senapan dari satu batalyon militer dibanding harus menghadapi satu pena wartawan.

Pada bagian lain, banyak orang yang menyebut wartawan adalah “*Ratu Dunia*” karena hasil pekerjaannya senantiasa menarik perhatian masyarakat dunia.

Benarkah sebegitu hebat posisi atau keberadaan wartawan?

Pertanyaan semacam itu secara mudah dapat dijawab: “*Ya*” dan “*Tidak*”, apalagi pada masa persaingan antar-wartawan untuk mendapatkan berita tercepat, terakurat, dan terlengkap.

Persaingan! Hal inilah yang agaknya menjadi “*agenda tetap*” wartawan dewasa ini. Oleh karena, dalam situasi dan kondisi pers idealis dan industrialis saat ini yang diutamakan adalah bagaimana pers dapat menjalankan peran idealis sebagai penyampai informasi, pendidik masyarakat, dan memberikan hiburan. Selain itu, pers dalam fungsinya sebagai lembaga industri perlu pula mengembangkan berita yang bernilai bisnis dari segi iklan.

Sekalipun demikian, wartawan keberhasilan awalnya lebih banyak ditentukan dari persiapan hingga hasil peliputan (*reportase*)-nya. Dengan kata lain, *proses* dan *hasil* pekerjaan bagi wartawan sama pentingnya.

Masyarakat umum seringkali mendengar istilah “*wartawan senior*” dan “*wartawan junior*”, namun seringkali sebutan itu justru menjerumuskan bagi kalangan wartawan sendiri. Oleh karena, dunia kewartawanan adalah dunia yang cenderung *egaliter* atau semuanya dalam posisi sederajat.

Bahkan, para wartawan di antara sesama mereka sering bergunjing: “*Apa beda wartawan senior dengan wartawan junior? Apakah mereka dibedakan dari segi usia, atau justru pengalaman?*”

Hampir di setiap media massa yang berusia lanjut atau di atas 10 tahun, menempatkan posisi wartawan senior dan junior dari dua sudut perhitungan profesional, karena ada asumsi bahwa wartawan yang berusia tua otomatis memiliki banyak pengalaman.

Namun, sudut perhitungan profesional lainnya justru berpendapat bahwa wartawan senior bisa saja masih berusia muda, namun secara pribadi memiliki hasil peliputan yang senantiasa memiliki “*nilai jual*” atau mampu menjadi topik pembicaraan banyak orang.

Sejumlah media massa yang mapan –bertiras lebih dari 100.000 eksemplar—menempatkan sebutan “*wartawan senior*” bukanlah dari segi usia, namun dari kemampuan wartawannya menjalani proses liputan terbaik.

Letjen TNI Sjarwan Hamid, mantan Kepala Staf Sosial dan Politik (Kassospol) ABRI dan mantan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) ABRI yang kini menjadi Wakil Ketua DPR dari Fraksi ABRI, dalam berbagai kesempatan berdiskusi dengan insan pers secara jelas membagi kemampuan wartawan menjadi: **1. Journalist. 2. Agent. 3. Lobbyist.**

Wartawan sebagai “*journalist*”, menurut Sjarwan, merupakan wujud wartawan yang menjalani tugas dasarnya sebagai orang yang melaporkan (*de journale*) kejadian dari fakta-fakta yang terjadi.

Jenderal asal Riau itu juga menilai, wartawan sebagai “*agent*” merupakan cara kerja “*journalist*” yang dalam prosesnya melakukan serangkaian pengumpulan fakta-fakta dari suatu kejadian yang dipaparkan untuk kepentingan umum melalui media massanya. Ia menambahkan, wartawan sebagai “*lobbyist*” merupakan satu kecenderungan dimana wartawan adalah juga bagian yang tidak terlepas dalam tatanan kehidupan sosial dari tingkat bawah hingga atas, sehingga secara pribadi mampu memberikan masukan positif bagi pemegang kebijakan.

“Jika saja ada wartawan yang mampu menjalankan tiga posisi tersebut secara tepat, maka ia merupakan wartawan senior yang bersikap profesional. Saya kira sekarang kecenderungan ini kian banyak,” kata Sjarwan Hamid saat berkunjung ke LKBN ANTARA dalam kapasitasnya selaku Kapuspen ABRI, medio 1993.

Paling tidak, Sjarwan Hamid dalam komentarnya itu mencerminkan bahwa posisi wartawan dalam tugas kewartawannya harus “*pintar-pintar*” menempatkan diri, sehingga karya jurnalistiknya menjadi lebih komprehensif (lengkap, mencakup semua hal).

Penempatan posisi wartawan sekaligus agen pembaruan, dan pelobi semacam itu, menurut Jacob Oetama –pendiri, Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi Harian Umum Kompas—yang wartawan senior dari segi usia dan “jam terbang”, dapat dibenarkan.

“Oleh karena itu, *wartawan* yang baik dalam arti selalu ingin mengasah kemampuannya secara naluriah akan terlatih menjadi *pelobi* di semua kalangan masyarakat, dan berita yang dihasilkannya bertujuan memperjuangkan kepentingan umum sehingga ia layak disebut sebagai *agen pembangunan mental* dan *spiritual*,” demikian Jacob Oetama dalam satu diskusinya dengan sejumlah wartawan muda di Jakarta, medio 1996.

MANAJEMEN SISTEM INFORMASI KEWARTAWANAN

Rosihan Anwar, wartawan senior yang mantan Ketua Umum PWI, ketika ditanya seorang wartawan pemula tentang: “Apa kunci suksesnya dalam dunia jurnalistik yang senantiasa bersaing dan banyak menghadapi dilema dengan nara sumber?”

“Nak, cobalah untuk *‘be smart’* dan kembangkanlah untuk *‘keep smart’*,” jawab wartawan senior itu.

Jika kita berangkat dari bahasa Inggris harfiah, maka ada banyak padanan kata untuk menjelaskan arti *“be smart”* dan *“keep smart”* tersebut. Namun, kita dapat dengan mudah menerjemahkannya sebagai *“pandai-pandailah”* dan mengembangkannya menjadi *“senantiasa pandai.”* Atau, *wartawan harus “pandai” dalam berbagai hal.*

Salah satu cara mencapai kepandaian dalam peliputan, wartawan setidaknya-tidaknya perlu memahami prinsip dasar sistem pekerjaannya, kemudian mengembangkan sistem manajemen informasi yang paling sesuai dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya. Selanjutnya, wartawan harus pula mengembangkan kemampuan tersebut untuk menutupi atau bahkan menghilangkan kelemahan yang ada dan menjadi hambatan saat melakukan peliputan.

Prinsip dasar sistem pekerjaan kewartawan secara ringkas terbagi dalam tiga tahapan utama, yaitu:

1. ***News Gathering***. Hal ini adalah proses awal dari sistem pemberitaan, yakni tahapan satu organisasi media massa yang diwakili wartawannya mulai ***mengumpulkan berita***.
2. ***News Editing***. Hal ini adalah proses lanjutan dari sistem pemberitaan, yakni tahapan satu organisasi media massa yang diwakili oleh para redaktur melakukan ***penyuntingan berita***.
3. ***News Distribution***. Hal ini adalah proses akhir dari sistem pemberitaan, yakni tahapan satu organisasi media massa ***menyebarkan berita*** kepada publiknya.
4. ***News Evaluation***. Hal ini banyak berkaitan dengan sistem media massa yang senantiasa berupaya mengembangkan mutu –bukan hanya jumlah–beritanya, sehingga menerapkan pola analisa isi (***contents analyst***) yang biasanya dilakukan oleh satu unit/divisi khusus dalam manajemen keredaksian. Dari tahapan evaluasi tersebut, maka media massa berupaya pula mengadakan perbaikan mutu isi karya jurnalistiknya melalui ***editorial clinic*** dan pendidikan berkelanjutan (***continuing education***).

Sistem manajemen informasi kewartawan yang disebut pula sebagai sistem ***“GEDE”*** (***Gathering, Editing, Distribution, and Evaluation***) tersebut idealnya bukan saja dilakukan secara tim oleh organisasi/lembaga media massa, namun perlu pula dilatih dan dikembangkan oleh personelnya mulai tingkat wartawan pemula hingga utama.

Salah satu kendala yang sering terjadi dalam sistem manajemen informasi kewartawan adalah lambatnya proses penyuntingan dan penyebaran berita/karangan khas karena

banyak wartawan yang enggan menyunting ulang karya jurnalistiknya sebelum diserahkan/dikirimkan kepada penyuntingnya.

Padahal, wartawan adalah “*ujung tombak*” sistem manajemen informasi kewartawanan, sehingga seharusnya mereka dapat membuat berita/karangan khas “*press-klaar*” (layak siar). Sementara itu, penyunting tugasnya lebih banyak memeriksa ulang, dan memberikan tambahan latar belakang bila dianggap perlu.

Selain itu, wartawan sebagai manajer dalam proses pemberitaan dewasa ini kian dituntut memahami prinsip dasar manajemen, yakni menyusun Perencanaan, Organisasi, Aktualisasi, dan Pengawasan. Dalam ilmu manajemen klasik, hal tersebut dikenal dengan konsep *Planning, Organizing, Actuating, and Controlling (POAC)*.

Bagi wartawan konsep manajemen tersebut agaknya akan lebih berdayaguna dan berhasilguna bilamana dimulai dari konsep pribadi, yakni secara individu senantiasa memiliki perencanaan –peliputan maupun tugas jurnalistik lain sesuai penugasannya, seperti penyuntingan, dan rencana peningkatan karir--; mampu berorganisasi –dalam arti mampu menempatkan peran yang sebaik mungkin dalam organisasi media massanya--; mengembangkan aktualisasi diri –menempatkan diri sebagai anggota masyarakat--; serta dapat mengawasi seluruh rangkaian pekerjaannya.

Konsep manajemen pribadi, menurut Dr. Richard L. Leshner selaku Ketua Kamar Dagang Amerika Serikat (US Chamber of Commerce), kian menempati posisi yang taktis dan strategis dalam tataunan bisnis yang tanpa mengenal batas kewilayahan atau yang dikenal sebagai kesejagatan (globalisasi).

“Dunia memasuki masa keemasan baru dari apa yang dinamakan pasar bebas kesejagatan. Dalam masa inilah konsep manajemen pribadi, yakni kemampuan sumber daya manusia secara individu, akan lebih diutamakan karena profesi berkembang dengan cakupan kesejagatan pula,” catatnya dalam artikel berjudul *Democracy’s Promise: Building a Modern Economy* yang dipublikasikan melalui tayangan informasi (homepage) Internet beralamatkan <http://www.cipe.org/e23/Lese23.html> edisi 25 September 1997.

WAWANCARA, OPINI, DAN ACUAN DATA

Profesi wartawan selama ini lebih banyak dikenal dari penampilannya, seperti menenteng kamera, tape recorder, dan senantiasa banyak bertanya.

Dari sejumlah penampilan akrab tersebut, wartawan dalam beritanya akan senantiasa terkesan “*fresh*” (segar) bila ada unsur wawancara atau tanya-jawab dengan nara sumber.

Bila wartawan membiasakan diri menulis berita hanya sekedar menerima informasi apa adanya dari nara sumber, maka kesannya monoton. Bahkan, secara profesional wartawan tersebut telah memulai proses pembodohan dalam karier jurnalistiknya.

Wawancara ibaratnya “*bunga*” dalam dunia kewartawanan. Wawancara merupakan satu upaya wartawan untuk mengetahui dan mendapatkan penegasan lebih banyak tentang latar belakang, permasalahan, bahkan skandal dari suatu fakta.

Secara umum wawancara memiliki dua bentuk utama, yakni:

1. **Wawancara lisan.** Hal ini sering dilakukan wartawan yang mengadakan percakapan/tanya-jawab langsung atau melakukan tatap muka dengan nara sumbernya.
2. **Wawancara tertulis.** Hal ini sering dilakukan wartawan untuk menyiapkan serjumlah pertanyaan untuk nara sumbernya. Kondisi semacam ini lebih sering dilakukan wartawan karena nara sumber menginginkan pola wawancara tertulis, sehingga serangkaian jawaban dapat disusun secara lebih rinci dan akurat. Namun, wartawan dalam hal ini menjadi sulit menangkap nuansa dan suasana “*kehidupan*” berwawancara, seperti bahasa tubuh (*body language*) nara sumber saat memberi keterangan. Selain itu, banyak nara sumber dalam memberikan jawaban tertulis hanya sekedar memeriksa atau membaca ulang saja, karena seluruh jawaban disusun oleh staf/sekretaris-nya.

Sementara itu, wawancara dilihat dari prosesnya dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

1. **Wawancara dipersiapkan.** Hal ini biasa terjadi bila wartawan telah mengadakan janji dengan nara sumber untuk mengadakan wawancara khusus. Biasanya wawancara ini didahului dengan proses tawar-menawar untuk menentukan topik pembicaraan, waktu, dan tempat kegiatan berlangsung. Jika dikaitkan dengan faktor tempat, maka wawancara dalam jumpa pers (*press conference*) termasuk dalam bagian dari wawancara dipersiapkan.
2. **Wawancara bertelepon.** Hal ini biasa dilakukan wartawan dengan nara sumber yang sudah saling mengenal satu sama lain, bahkan dalam tahapan semacam ini menjadikan wartawan mulai menempatkan posisinya selaku “*lobbyist*”. Wawancara semacam ini memerlukan kehati-hatian tatkala nara sumber menyebutkan informasi yang berkaitan dengan angka, nama, dan sejumlah karakter perkataan asing, sehingga wartawan jangan ragu-ragu untuk menanyakan ulang guna mendapatkan penegasan.
3. **Wawancara dadakan.** Hal ini menjadi bagian dari seni jurnalistik yang mau tidak mau, suka tidak suka harus dijalani oleh wartawan untuk mengembangkan kemampuannya. Oleh karena, berita dapat terjadi kapan saja tanpa rencana, sehingga dalam sistem manajemen informasi kewartawanan dikenal istilah “*intellectually alert*” atau wartawan dituntut selalu waspada secara intelektual. Seringkali wawancara dadakan semacam ini dinamakan pula “*kesandung berita*”, karena wartawan mendapatkan berita sama sekali tanpa diduga sebelumnya. Contohnya, seperti bertemu seorang Menteri di Bandara Soekarno-Hatta secara kebetulan, dan ternyata nara sumber tersebut memiliki informasi yang layak siar.

Pembagian bentuk dan proses wawancara seperti hal di atas lebih banyak berangkat dari pendekatan teori, karena wartawan dalam kesehariannya melakukan wawancara dengan bentuk dan proses yang seringkali tumpang tindih.

Bahkan, cara wawancara mereka menjadi hanya terbagi dua, yakni wawancara yang hanya mengikuti arus pertanyaan wartawan lain ataupun mengikuti jawaban nara sumber—karena wartawan bersangkutan tidak memiliki persiapan materi/bahan permasalahan—; dan wawancara yang mengarah pada satu topik utama secara mendalam (*loaded question*) karena wartawannya memiliki penguasaan materi memadai.

Selain wawancara, wartawan dalam tugas hariannya memerlukan pula Acuan Data (*database*) pribadi yang multi-fungsi, mulai menegaskan data (konfirmasi) hingga mencari peluang untuk mengembangkan berita/karangan khususnya.

Banyak wartawan yang dalam tugasnya terkesan hanya sedikit bertanya kepada nara sumber, namun dalam berita/karangan khususnya ia mampu memberikan latar belakang permasalahan secara komprehensif. Hal ini bisa saja terjadi, asalkan wartawan bersangkutan memiliki acuan data yang memadai.

Acuan data pada umumnya dapat kita dapatkan dari berbagai tempat, seperti perpustakaan, toko buku, dan Internet. Namun, wartawan ada baiknya memiliki acuan data pribadi, terutama menyangkut bidang liputan khususnya dimulai dari satu catatan kecil dalam *blocknote* (notes) sebelum mengembangkannya ke *notebook* komputer. Oleh karena, bagi wartawan semakin banyak pusat data yang diketahui akan banyak membuka peluang untuk mendapatkan informasi.

Upaya wartawan untuk menggabungkan fakta dari satu kejadian dengan acuan data merupakan satu langkah awal dari perkembangan jurnalistik presisi (*precision journalism*), yakni karya jurnalistik yang memadukan proses berpikir logis dan komplit guna mengaitkan satu fakta dengan berbagai permasalahan lainnya.

Filsuf Schonpenhauer dari Jerman pernah mengatakan: “Berpikir logis adalah berpikir secara terdidik.” Dr. Hellwig dalam buku “*Psychologie und Vernehmungstechnik*”, terbitan *Berlin, Germany*, pada 1951 mengutip pendapat Schonpenhauer bahwa tidak semua cara berpikir menghasilkan sesuatu yang logis.

Berpikir logis, menurut Schonpenhauer, setidaknya-tidaknya memiliki tahapan dari tidak mengetahui sesuatu, menuju mengetahui sesuatu, dan berupaya menyingkap segala sesuatu yang berhubungan dengan soal yang bersangkutan.

Pola berpikir logis semacam itulah yang harus dimiliki oleh wartawan, sehingga karyanya menjadi bagian dari hasil pekerjaan jurnalistik presisi sesuai tujuan media massanya untuk menyebarkan informasi, mendidik dan menghibur khalayak.

Dalam proses menghasilkan karya jurnalistik—berita/karangan khas/foto—yang terpenting bukan sekedar mendapatkan bahan yang baik, namun bagaimana mengolah dan mengembangkan bahan tulisan/foto sehingga menjadi baik, menarik dan banyak memberikan makna bagi khalayak.

Proses dan hasil dalam karya jurnalistik adalah dua hal yang sama pentingnya, karena upaya mencari dan membuat berita/karangan khas/foto termasuk bukti otentik dari satu perjalanan sejarah yang bermakna.

Makna yang disumbangkan wartawan melalui hasil karya jurnalistiknya seringkali dikaitkan orang dengan keberhasilannya membentuk opini publik. Sementara itu, secara tegas kaidah jurnalistik memberikan batasan bahwa wartawan adalah *de journale* alias sang pelapor dari satu kejadian yang patut diketahui umum.

Sebagai *de journale*, maka wartawan secara profesional tidak diperkenankan beropini karena berada dalam posisi netral atau tidak memihak. Pada prinsipnya, wartawan hanya menyajikan serangkaian fakta, data, dan pernyataan nara sumber, sementara itu opini publik akan terbentuk dengan sendirinya sebagai dampak penyajian informasi yang berlogika.

Namun demikian, wartawan dalam praktek kesehariannya dapat “*membungkus*” opininya dalam bentuk:

1. *Opini di balik data*, yaitu wartawan dapat menyajikan opininya dengan memanfaatkan data akurat dalam karya jurnalistiknya. Contoh: *Indonesia saat ini memiliki jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 17 juta jiwa dari total jumlah penduduk Indonesia sekitar 185 juta jiwa, catat Biro Pusat Statistik (BPS) dari hasil Sensus Ekonomi tahun 1995.*
2. *Opini di balik fakta*, yaitu wartawan dapat menyajikan opininya dengan mengemukakan fakta nyata dari satu peristiwa. Contoh: (dari buku *Memenuhi Panggilan Tugas* jilid ketujuh karya Dr. A.H. Nasution, terbitan CV Haji Mas Agung, Jakarta, 1989, hal. 55).
Ketua MPRS Jenderal A.H. Nasution yang baru saja selesai dengan tugas-tugas memimpin sidang MPRS kini agak menjadi kurus karena kesibukan-kesibukannya.
Hal ini kelihatan dari pakaian yang dikenakan Jenderal Nasution, bajunya menjadi longgar, sedang pinggang celananya tampak menjadi kebesaran.
Ketika Ketua MPRS itu menghadiri upacara Maulud Nabi di Lapangan banteng, Kamis pagi, tampak sebentar-sebentar mengangkat pinggang celananya yang melonggar ke bawah.
3. *Opini di balik nara sumber*, yaitu wartawan dapat menyajikan opininya dengan menempatkan pernyataan penting dari nara sumbernya. Contoh: “*Dewasa ini banyak pengusaha nasional yang terlalu mengandalkan bisnisnya dari utang luar negeri, sehingga menyulitkan posisi ekonomi Indonesia di tengah hantaman mata uang dolar AS,*” *kata Menkeu Mar’ie Muhammad kepada pers di Jakarta, Jumat.*

Kemampuan wartawan dalam menyajikan opini dengan berbagai kiatnya seperti itulah yang agaknya membuat dunia jurnalistik senantiasa tidak pernah berhenti untuk berlogika, sehingga publik pun menanti kehadirannya.

WARTAWAN BERTEKNOLOGI INFORMASI

Memasuki dasawarsa 1990, wartawan di sejumlah kantor berita transnasional –terutama Reuters, AFP, DPA, dan AP—menghadapi kecenderungan baru, yakni mereka lebih dituntut untuk memahami sekaligus menguasai teknologi informasi, lebih beretika, serta tidak meninggalkan logika dalam menjalankan tugasnya.

Kecenderungan baru itu, bagi wartawan, hadirnya berbarengan dengan kemajuan teknologi informasi jaringan komputer kesejagatan yang kemudian dikenal dengan nama *Internet* alias *Cyber-Space* alias *Superhighway*.

Berangkat dari pendekatan keilmuan, teknologi informasi berbasis Internet bukanlah hal baru. *Nobert Wiener*, matematikawan dari Amerika Serikat, pada tahun 1948 sempat mengemukakan teori tentang *Cybernetics* (sibernetika) yang berasumsi bahwa sekumpulan mesin yang saling terkoneksi memiliki tingkat komunikasi seperti halnya makhluk hidup. Bahkan, mereka dihubungkan oleh sejumlah jaringan elektronik dan mekanik yang berfungsi interaktif sebagaimana urat syaraf.

Pendapat Wiener (1884-1964) langsung mendapat banyak cemoohan dari pakar komunikasi. Beberapa di antara mereka menilai, Wiener terlalu berlebihan menempatkan fungsi alat elektronik dan mekanik setingkat dengan makhluk hidup. Ada pula yang berpendapat, “Apakah Wiener ingin menjadi Tuhan? Dan, ia menganggap dirinya sebagai pencipta makhluk yang bernama mesin elektronik dan mekanik.”

Oleh karena itu, teori Wiener tentang sibernetika sempat menghilang untuk waktu yang cukup lama. Banyak pakar komunikasi enggan memahami paham tersebut, atau bisa jadi mereka justru tidak pernah mendengar dan mengetahui tentang sibernetika.

Syukurlah, Webster dalam sejumlah kamusnya –seperti *Dictionary of People* dan *Dictionary and Thesaurus*—tidak pernah melupakan nama Nobert Wiener sebagai penemu *Cybernetics* yang diterjemahkan sebagai *studi perbandingan dari komunikasi otomatis dan menekankan fungsi pengawasan dari kehidupan tubuh secara mekanis, serta didukung sistem elektronik*.

Anehnya, pendapat Wiener justru banyak mendapat perhatian sejumlah pakar di Rusia yang antara lain dipelopori oleh *Vladimir Talmy* yang bukunya diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh *Yelena Saparina* dengan judul *Cybernetics Within Us* terbitan Peace Publisher Moscow, 1952.

Vladimir Talmy berpendapat, sibernetika setidaknya-tidaknya memerlukan pemahaman dari lima sudut keilmuan, yaitu matematika, logika (filsafat), biologi, komunikasi, dan sistem pengawasan otomatis (fisika).

Dalam proses menyiapkan bukunya, Talmy banyak mewawancarai orang sebagai contoh penelitian pemahaman tentang sibernetika. Akhirnya, ia berasumsi bahwa di antara kalangan akademisi tua dan muda secara umum memiliki pendapat yang sama tentang sibernetika sebagai sibernetika rekayasa (*engineering cybernetics*) dan sibernetika biologis (*biological cybernetics*).

Pada perkembangannya kemudian, sejumlah pakar sibernetika di Rusia –kala masih tergabung dalam Uni Soviet—banyak melakukan penelitian tentang aspek komunikasi mesin *berurat-syaraf* dengan memadukan lima keilmuan seperti dikemukakan Vladimir Talmy. Bahkan, dua pendekatan itulah yang menjadi bagian dalam konsep dasar *Sputnik* alias satelit telekomunikasi pertama Uni Soviet (dan juga dunia) pada tahun 1957.

Di belahan bumi lainnya, Amerika Serikat yang tidak mau *kehilangan muka* terhadap kemajuan sistem satelit telekomunikasi Uni Soviet –karena saat itu terjadi Perang Dingin blok Timur dengan blok Barat—langsung membangun jaringan *Advanced Research Project Agency (ARPA)*, yang kemudian berkembang menjadi *ARPANet* dengan dukungan Departemen Pertahanan.

ARPANet itulah yang menjadi cikal bakal sistem Internet alias sistem jaringan komputer terhubung secara global. Secara mudah, Internet dapat diterjemahkan pula sebagai sekumpulan komputer ibarat urat syaraf manusia. Internet memiliki sistem yang disebut tulang punggung (*backbone*) yang terhubung dalam satu jaringan sederhana/ringkas menuju bagian terpadu di *Internet Service Provider (ISP)* alias agen layanan penjualan akses nama dan kode menuju jaringan yang lebih luas lagi.

Karena sistemnya yang saling silang dengan bantuan saluran telepon dan modem –alat pengubah sinyal timbal balik dari pesan berupa data/teks/suara/gambar menjadi elektronis pulsa kembali ke pesan berupa data/teks/suara/gambar--, Internet diibaratkan sebagai jalan tol tingkat tinggi atau *Superhighway*.

Berangkat dari konsep peristilahan jalan raya bebas hambatan itulah, Internet dalam sajian informasinya memiliki berbagai keragaman seperti halnya kawasan lalu-lintas yang memiliki kawasan hiburan –dalam Internet disebut juga *cyberfun*--, jaringan gereja Katholik (*ChatolicNet*), jaringan informasi Islam (*IslamNet*), jaringan informasi berita media massa dunia (*NewsWork*) hingga jaringan informasi pornografi (*cyberporn*).

Selain itu, Internet disebut juga sebagai *Cyberspace* karena memiliki jaringan komunikasi ibarat di dunia maya. Sedangkan, para pemakai Internet mendapat julukan *Netter* (pemakai jaringan), *Surfer* (peselancar/penjelajah), dan sejumlah sebutan nama lainnya.

Kemudian, Internet sebagai hasil temuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dunia informasi kian menemukan jalannya sebagai produk bisnis karena memiliki banyak keunggulan, terutama dari segi efisiensi biaya dan efektivitas penyampaian pesan yang cepat, serta dapat menembus ruang sekaligus waktu. Dalam hal inilah, Internet menemukan kelebihanannya sebagai *media anti-sensor*.

Dunia bisnis informasi yang berkembang didukung oleh persaingan berbagai perusahaan sistem jaringan piranti lunak (*software*) dan piranti keras (*hardware*) komputer, pada medio 1996 melahirkan apa yang dikenal sebagai *Internet-Intranet-Extranet*. Dengan kata lain, Internet secara sistem, manfaat, dan dampaknya semakin meluas sebagai jaringan yang terbuka, eksklusif, atau justru super-eksklusif dengan nilai bisnis.

Bisnis informasi semacam itulah yang sebenarnya sejak awal 1990-an telah menjadi kajian banyak media massa di dunia –dunia pers Indonesia terlihat baru mengincarnya di tahun 1995, sejalan dengan maraknya *Internet Service Provider (ISP)* nasional—sebagai salah satu peluang menjangkau pasar masyarakat dunia.

Pada dasarnya, Internet, Intranet, dan Extranet tidak memiliki perbedaan yang mendasar dari segi teknik. Hanya saja, ketiga teknologi informasi tersebut memiliki perbedaan dari segi konfigurasi cakupan pemanfaatannya.

Internet lebih bersifat umum, yakni merupakan jaringan komputer global yang menjadi dasar sistem Intranet dan Extranet. Sedangkan, Intranet merupakan konfigurasi yang diatur menjadi lebih eksklusif, dan biasanya digunakan oleh satu perusahaan yang menginginkan jaringan komputernya dapat terhubung dengan Internet, namun memiliki pengamanan khusus yang biasa disebut *firewall* agar pihak di luar sistem komputer perusahaan bersangkutan tidak dapat mengetahui kondisi internalnya.

Sementara itu, Extranet sistem dasarnya sama dengan Internet, hanya saja cakupan pemanfaatannya lebih sering digunakan oleh perusahaan multi-nasional yang ingin menerapkan jaringan komputer yang dapat terkoneksi dengan Internet secara luas, tetapi pihak di luar jaringan multi-nasional itu tidak dapat menembusnya.

Dalam media massa, teknologi informasi semacam ini dipadukan sesuai dengan kebutuhan bisnis informasi yang dilayaninya. Sebagai contoh, Kantor Berita Transnasional semacam Reuters, AFP, dan DPA menerapkan Extranet dalam jaringan internalnya, karena masing-masing kantor berita tersebut memiliki cabang mancanegara. Namun, secara eksklusif mereka mengamankan sistem jaringan tersebut (Intranet) agar tidak setiap pemakai Internet yang terbuka dapat menembus sistem internal kantor berita bersangkutan. Hanya saja, sejumlah kantor berita tersebut tetap memiliki tayangan yang dinamakan homepage dalam layanan Internet secara terbuka.

Penempatan konfigurasi cakupan sistem teknologi informasi tersebut secara umum ditentukan oleh visi dan misi organisasi bisnis yang memanfaatkannya. Namun, Internet-Intranet-Extranet memiliki fasilitas dasar yang sama dalam proses pengoperasiannya, antara lain:

1. **Electronic Mail (e-mail)**; yaitu fasilitas pengiriman dan penerimaan surat elektronik yang dilengkapi pula dengan fasilitas “copy carbon” (tembusan), sehingga memungkinkan mengirimkan isi surat yang sama ke beberapa alamat pemakai Internet. Contoh alamat e-mail: *priya3rh@indosat.net.id* yang artinya pengguna surat elektronik tersebut memilih nama *priya3rh* yang berlangganan melalui Internet Service Provider (ISP) milik *PT Indosat* yang berlokasi di *Indonesia (id)*.
2. **Mailing List (mailist)**; yaitu fasilitas seperti e-mail yang menghimpun banyak orang sebagai peserta, sehingga proses pengiriman dan penerimaan surat dapat dilakukan secara massal. Biasanya fasilitas ini digunakan untuk kelompok tertentu, seperti alamat mailist: *indonesia-press@itb.ac.id* yang artinya mailist tersebut terdiri dari

sejumlah anggota peminat masalah *pres* di *Indonesia*, dikelola oleh *ITB (Institut Teknologi Bandung)* yang merupakan *akademi pendidikan (ac)* yang berlokasi di *Indonesia (id)*.

3. **World Wide Web (WWW)**; yaitu fasilitas tayangan informasi yang biasa disebut homepage yang juga memiliki alamat-alamat khusus (*URL=Uniform Resource Locator*) berdasarkan nama kelompoknya (*domain name*). Contoh alamat homepage: *http://www.antara.co.id* yang artinya tayangan informasi tersebut memilih nama *antara* yang merupakan *organisasi komersial non-profit (co)* yang berlokasi di *Indonesia (id)*.
4. **File Transfer Protocol (FTP)**; yaitu fasilitas pengiriman file berupa data/teks/gambar/suara melalui jaringan Internet tanpa adanya perubahan isi dari segi kuantitas maupun kualitas. Proses pengiriman file dapat dilakukan secara otomatis berdasarkan nama menurut alamat e-mail maupun URL.
5. **Internet Relay Chat (IRC)**; yaitu fasilitas yang memungkinkan banyak pengguna Internet berdiskusi secara langsung melalui jaringan komputer mereka. Dengan kata lain, proses chatting (berbincang) ini mirip dengan kegiatan “nge-break” seperti yang dilakukan melalui sarana radio telekomunikasi yang dilakukan para amatir radio anggota Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP) dan Organisasi Amatir Radio Republik Indonesia (ORARI).
6. **Netsearch** atau **Search Engine**; yaitu fasilitas pencarian informasi dari seluruh jaringan komputer global yang tergabung dalam Internet, sehingga memungkinkan para pengguna Internet memperoleh data apa pun yang mereka inginkan. Sistem pencarian informasi semacam ini memanfaatkan sistem jasa layanan informasi global (*WAIS=Wide Area Information Service*). Beberapa organisasi yang terkenal dengan layanan WAIS adalah Yahoo (*http://www.yahoo.com*), Alta Vista (*http://www.altavista.com*), Infoseek (*http://www.infoseek.com*), dan Lycos (*http://www.lycos.com*).

Berbagai fasilitas dasar Internet tersebut hingga saat ini memiliki program yang beraneka ragam sesuai dengan layanan yang diberikan oleh Internet Service Provider (ISP) kepada pelanggannya. Dan, ISP yang profesional cenderung akan memberikan fasilitas yang terlengkap bagi pelanggannya, sehingga banyak pula yang memberikan fasilitas tambahan seperti telepon Internet (*Telnet*), buku iklan elektronik (*elektronik yellow pages*), pusat dokumentasi pelanggan (*Whois*), faksimili Internet (*Fax-Net*), pemeriksa jaringan telepon (*Ping*), dan layanan informasi terpadu untuk kelompok minat tertentu (*Newsgroup*).

Dari segi sarana dan prasarana dasar, pemakai Internet memerlukan:

1. **Hardware** (piranti keras), yaitu berupa peralatan komputer, modem dan saluran telepon.
2. **Software** (piranti lunak), yaitu berupa program komputer yang berfungsi membuka akses Internet. Piranti ini biasanya sudah tersedia dalam program Windows 95 dan Windows 97, atau disediakan oleh Internet Service Provider (ISP).

3. **Brainware** (piranti pikir), yaitu kemampuan sumber daya manusia (sdm) untuk mendayagunakan piranti keras dan lunak. Secara umum kalangan usia produktif (17-60 tahun) dapat mempelajari sistem Internet dasar dalam waktu dua jam pelatihan.

Beranjak dari sejumlah fasilitas yang diberikannya, maka Internet merupakan alternatif yang sangat menarik bagi media massa yang senantiasa mengutamakan unsur kecepatan, keakuratan dan kelengkapan dalam penyebaran berita/informasinya.

Rupert Murdoch sang **Raja Surat Kabar** sejak awal 1990-an sudah menugasi para redaktur dan wartawannya untuk segera menguasai fasilitas apa saja yang ada di Internet, terutama fasilitas e-mail dan World Wide Web (WWW), yang memungkinkan media massa menerima dan mengirimkan berita secara cepat, murah, dan dapat dipromosikan kepada khalayak tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Hal serupa juga dilakukan oleh **Ted Turner** sang pemilik jaringan televisi kabel khusus berita (**CNN=Cable News Network**), sehingga tayangan informasi CNN bukan sekedar menjadi media elektronika, melainkan berkembang menjadi multimedia massa.

Multimedia massa (**mass multimedia**)! Inilah kecenderungan baru dalam dunia pers yang dipengaruhi oleh hasil teknologi informasi yang dinamakan Internet. Hal inilah yang membuat setiap media publikasi massa dapat ditayangkan secara komplit dalam bentuk teks, gambar (foto dan video), dan suara yang umpan baliknya dapat pula dilakukan secara langsung (**interaktif**).

Sejalan dengan kecenderungan semacam itu, wartawan kini tidak lagi dituntut hanya sekedar mencari, membuat, dan mempublikasikan beritanya. Lebih jauh lagi, wartawan dituntut untuk menguasai teknologi informasi terbaru, terutama Internet yang dapat memudahkan proses pekerjaan ideal mereka.

Mengapa harus berteknologi Internet? Hal ini mungkin pertanyaan umum yang sering dilontarkan banyak wartawan. Padahal, jika saja mereka sudah terbiasa memanfaatkan Internet, maka mereka juga akan terbiasa mencari/melacak, menegaskan (konfirmasi), mencari kejelasan (klarifikasi), mengirimkan sampai dengan mempublikasikan karya jurnalistiknya melalui Internet.

Dari kecenderungan semacam itu pula terbentuklah satu sebutan baru di kalangan wartawan, yaitu **Cyber-Journalist** atau **Online-Journalist** sebagai sebutan bagi wartawan yang dalam proses kerjanya memanfaatkan fasilitas Internet.

Randy Reddick dan **Elliot King** dalam buku bertitel **Online-Journalist, using Internet and Other Electronic Resources** terbitan Harcourt Brace & Company, pada 1995, berpendapat bahwa Internet membawa dampak bagi dunia kewartawanan, setidaknya tidaknya dalam proses pencarian, pembuatan, dan publikasi berita.

“Sekarang ini, Internet berada kira-kira pada tingkat perkembangan telepon di tahun 1890-an. Sambungan ke Internet belum untuk semua orang. Menjalankan Internet

tidaklah mudah. Dan, dewasa ini hanya sejumlah wartawan tertentu saja yang memanfaatkannya,” catat Reddick dan King.

Kemudian, mereka menambahkan, “Walaupun demikian, dalam bentuknya yang sekarang pun, Internet sangat berguna karena wartawan dapat melaksanakan tugas utamanya mengumpulkan dan menyampaikan informasi pada khalayak ramai secara lebih mendalam dan efisien.”

Bahkan, *William (Bill) Gates* sebagai pemilik perusahaan piranti lunak komputer Microsoft pada 26 Mei 1995 –tiga bulan sebelum peluncuran program Windows 95—membuat memo khusus bertitel “Pasang Naik Internet” bagi semua karyawannya.

Satu kutipan singkat dari memo khusus itu adalah: “Sekarang saya menetapkan Internet pada tingkat tertinggi dan terpenting. Dalam tempo ini saya menjelaskan bahwa fokus kita pada Internet mutlak penting bagi setiap bisnis kita.”

Kemudian, Bill Gates saat meluncurkan produk Windows 95 sempat mendapat pertanyaan pers tentang siapa target utama dalam proses pengembangan produknya yang berfokus pada Internet?

“Andalah target keberhasilan produk ini. Jika saja saya dapat memuaskan kebutuhan teknologi informasi kalangan wartawan yang dikenal sebagai kalangan yang haus untuk mencari, dan pemurah untuk membagikan informasi yang dinamakan berita, maka saya atas nama penduduk dunia akan sangat berbahagia,” jawab Bill Gates.

Oleh karena itu, dunia kewartawanan kini semakin menghadapi fenomena yang menarik dalam upaya mempertahankan keberadaannya sebagai “Ratu Dunia”. Hanya saja masalahnya, tatkala teknologi informasi sudah menyediakan penemuannya yang bernama Internet siap untuk dimanfaatkan, maka *“apakah para wartawan dapat segera menangkap dan mengembangkan peluang yang ada untuk menjadi cyber-journalist?”*

PELIPUTAN SELIDIK DAN JURNALISTIK SASTRA

Peliputan Selidik (*investigative reporting*) dan **Jurnalistik Sastra** (*literacy journalism*) hingga saat ini terlihat berjalan beriringan, namun posisi keduanya sering ditempatkan secara dilematis atau mendua sebagai sesuatu yang dianggap hebat, dan dicerca.

Banyak orang –termasuk di kalangan pers—menempatkan peliputan selidik sebagai pekerjaan yang hebat karena proses dan hasil kerja yang harus ditempuh oleh wartawan sebagai pelaku liputan relatif sulit, memakan waktu dan dana. Bahkan, wartawan yang terlibat seringkali harus berhadapan dengan apa yang dinamakan *“konflik kepentingan”* (*conflict of interest*) dari berbagai pihak.

Konflik kepentingan itulah yang membuka peluang bahwa proses dan hasil kerja dari peliputan selidik menjadi sering dicerca anggota masyarakat –juga oleh para wartawan

lain—karena dampak dari berita yang dipublikasikan senantiasa “*memakan korban*”, bahkan tanpa ampun.

Oleh karena itu ada sejumlah *kalimat mutiara peliputan selidik*, antara lain:

“Wartawan peliputan selidik memiliki kecenderungan seperti ikan piranha, mereka akan mengejar apa saja yang mengeluarkan darah.” (Ben J. Wattenberg)

“Jurnalisme tidak bekerja seperti senapan. Jurnalisme bekerja lebih mirip mortir.” (Murray Kempton)

Salah satu contoh dari peliputan selidik hingga saat ini adalah keberhasilan Bob Woodward dan Carl Bernstein yang “*memakan*” Presiden Amerika Serikat (AS) Richard Nixon, sehingga harus “rela” mundur dari kursi kepresidenan, dan digantikan oleh Gerald Ford pada 9 Agustus 1974. Padahal, upaya Woodward dan Bernstein untuk mengungkap kasus “*Watergate*” dimulainya pada medio Juni 1971.

Usai peliputan selidik itu, dunia pers –terutama di AS—seperti kerasukan apa yang dinamakan “*menggugat kembali kebebasan pers atas dasar liberalisme informasi*.” Apalagi, di AS sejak awal 1970 pertumbuhan industri pers menimbulkan persaingan yang makin tajam. Dan, peliputan selidik adalah salah satu resep untuk meraih oplan terbesar. Repotnya, insan pers di sejumlah negara –termasuk di Indonesia-- ada yang berkiblat tentang kebebasan pers di AS secara hitam putih, sehingga sering terkesan membabi-butu.

Padahal, peliputan selidik telah berlangsung sejak lama. Peliputan semacam itu dalam sejarah pers dunia sudah ada jauh sebelum era Woodward dan Bernstein. Oleh karena itu, masyarakat umum dan kalangan pers sering melontarkan, “*Peliputan selidik dalam perjalanannya demi kepentingan publik atau justru kepentingan bisnis?.*”

Professor Leonard Sellers, Guru Besar Ilmu Komunikasi/Jurnalistik di Universitas San Fransisco (AS), mengemukakan: “*Wartawan peliputan selidik adalah wartawan yang berusaha menyingkapkan informasi yang sengaja ditutup-tutupi, karena informasi tersebut melanggar hukum atau etika.*”

Berdasarkan dari pendekatan yang diajukan oleh Prof. Sellers, maka terkesan bahwa peliputan selidik tidaklah terlampau sulit. Padahal, banyak wartawan sulit menjalaninya. Bahkan, tak sedikit pula para pemimpin redaksi yang sangat selektif untuk menugasi wartawannya melakukan liputan selidik, dan mereka menyerahkan hal ini kepada yang benar-benar ahli.

Pada kenyataan di lapangan jurnalistik, wartawan liputan selidik sedikit-banyak atau terasa ataupun tidak harus memahami dan menjalani tahapan yang dari pendekatan ilmu pengetahuan dikenal dengan istilah *Metoda Ilmiah*.

Wartawan peliputan selidik sah-sah saja bergaya *cuek* (acuh tak acuh) dan tahapan kerjanya terkesan serabutan. Namun, jika ditilik lebih jauh lagi, mereka justru menjalani satu kaidah metoda ilmiah yang antara lain memiliki tahapan:

1. Mencari/mendapatkan masalah.
2. Memfokuskan permasalahan inti melalui observasi/wawancara.
3. Menyusun hipotesa/asumsi untuk menentukan motif dan latar belakang masalah inti.
4. Mengkaji, memilah, dan menyusun keterkaitan data/informasi.
5. Menulis hasil temuannya dengan kaidah jurnalistik.

Dalam menjalani metoda tersebut, wartawan peliputan selidik sering berhadapan dengan sejumlah bahaya berupa sulitnya mencari nara sumber yang mau *buka mulut*, namun ada kalanya banyaknya nara sumber yang terlalu ingin memberikan informasi tanpa nilai apapun.

Banyaknya nara sumber –terutama di bidang politik, atau politik-ekonomi-- yang ingin berbagi informasi, bagi wartawan tersebut perlu diwaspadai karena sumber tersebut lebih banyak yang sekedar mencari kepentingan pribadi. Sementara itu, nara sumber bernilai cenderung tersembunyi di antara hiruk-pikuknya gosip yang terus berhembus.

Selain itu, nara sumber penting untuk mengungkap permasalahan dalam peliputan selidik seringkali merasa harus sembunyi karena merasa memiliki banyak informasi, namun mereka *tidak memiliki restu* dari pihak yang lebih tinggi.

Istilah *dengan restu (by authority)* itulah yang dicatat William L. Rivers dan Cleve Mathews dalam buku “*Ethics for the Media*” terbitan Prentice-Hall Inc, New Jersey, (AS) pada tahun 1988 sebagai sesuatu yang justru mengawali keberanian pers AS untuk menembus birokrasi informasi dengan menerapkan apa yang kemudian dikenal sebagai *Peliputan Selidik (Investigative Reporting)*.

Awalnya, Benjamin Harris di tahun 1690 menerbitkan artikel pertama dan terakhirnya bertitlkan “*Public Occurrences, Both Foreign and Domestic*” yang intinya melontarkan kritik tentang keberadaan paham kolonialisme di Amerika.

Artikel tersebut membuat marah para petinggi, termasuk “*General Court of Massachusetts*” (setingkat Gubernur Jenderal zaman kolonial Belanda) sehingga surat kabar Benjamin Harris dibreidel dengan alasan “*meresahkan masyarakat*”.

Keadaan semacam itu berlangsung cukup berkepanjangan di AS, sehingga pada tahun 1721 James Franklin –kakak kandung Benjamin Franklin (1706-1790) ilmuwan dan penulis yang pernah menjadi Presiden AS—menerbitkan surat kabar “*New England Courant*” yang sejak terbit sudah menyuarakan sikap oposan kepada Pemerintah AS dengan alasan “*demi tegaknya jurnalisme perjuangan.*”

Akibat dari sikap tersebut, James Franklin sempat mendekam di penjara untuk beberapa lama. Namun, sikapnya ibarat “*bensin dalam api semangat pers AS*” karena

perkembangan pers bebas dengan pola peliputan selidik kian menjamur. Bahkan, wartawan mulai mengembangkan pola pemberitaan yang cepat, akurat, lengkap, dan cenderung **“memakan korban.”**

Sekalipun demikian, gaya kebebasan pers ala *cowboy* seringkali menjadi *kebablasan* (keterusan) dan meresahkan. Oleh karena itu, Presiden AS Theodore Roosevelt pada tahun 1906 pernah melontarkan kritik: **“Penulis yang sibuk mengais-ngais keburukan masyarakat hingga lupa untuk melihat keadaan sekelilingnya.”**

Roosevelt, yang juga penulis dan petualang di alam bebas, melontarkan kritik tersebut kepada David Graham Phillip yang secara berseri menulis tentang sejumlah keburukan anggota senat yang dituangkan dalam artikel bertitel **“The Treason of the Senate.”**

Gejala perdebatan tersebut ditangkap oleh Webster –pakar bahasa, penulis kamus—yang menuliskan istilah **“muckrake”** untuk mengartikan: **“mencari-cari, menyoroti, atau menunjukkan adanya korupsi, dengan bukti nyata atau hanya berdasarkan dugaan, oleh publik dan badan usaha.”**

Sementara itu, kalangan pers AS pada era Roosevelt justru banyak yang membenarkan sikap presidennya yang lebih menyukai sistem pengawasan pers secara seimbang dengan mengutamakan kepentingan semua pihak. Kala itu, Roosevelt memang dikenal sebagai Presiden AS yang dekat, bahkan akrab dengan pers. Buktinya, semua anggota Korps Wartawan Kepresidenan AS dapat bermain-main dengan cucu Roosevelt di Gedung Putih.

Namun, banyak wartawan AS yang kemudian –pasca-Roosevelt—berpendapat: “Kini masalahnya sudah berubah. Apakah semua Presiden bisa akrab dengan pers seperti Roosevelt?”

Bahkan, secara lebih tegas Joseph Alsop pernah mencatat: **“Semua pemerintahan menyebarkan dusta, bahkan beberapa di antaranya berdusta lebih banyak daripada yang lain.”** Inilah salah satu puncak ungkapan jenis pekerjaan di kalangan wartawan peliputan selidik di AS.

Sementara itu, Albert L. Hester selaku wartawan senior dan pakar ilmu komunikasi dari Universitas Georgia (AS) yang menaruh minat terhadap perkembangan pers di negara-negara berkembang mengemukakan bahwa peliputan selidik cenderung lebih sulit dilakukan bila sistem pers menjadi bagian yang erat menyatu dengan pemerintahan nasional.

“Meskipun di Dunia Ketiga pers terpisah dari pemerintah nasional, namun ide untuk benar-benar melakukan ‘penyelidikan; menjadi sesuatu yang selalu mengernyitkan kening,” catatnya dalam buku **“Handbook for Third World Journalists”**, terbitan The Center for International Mass Communication Training and Research, Universitas Georgia, pada 1987.

Walaupun demikian, menurut Hester, peliputan selidik di negara berkembang tetap dapat dilakukan. Bahkan, wartawan peliputan selidik di negara berkembang seringkali memiliki kegigihan yang tak kalah dibanding rekan mereka di negara yang lebih mapan.

Lebih jauh, Hester membedakan peliputan selidik dengan peliputan biasa. Hal itu disusunnya atas dasar bahwa peliputan selidik adalah:

1. Biasanya dilakukan dengan pikiran bahwa hasilnya akan menimbulkan satu tindakan dengan asumsi dasar: *“Perubahan harus dilakukan.”* Namun, peliputan selidik ada kalanya justru memperteguh apa yang sudah dilakukan dan dihargai oleh masyarakat.
2. Biasanya format laporan (tertulis maupun foto) peliputan selidik lebih panjang dan memerlukan waktu penyelesaian lebih panjang, serta dana lebih banyak.
3. Biasanya peliputan selidik memerlukan kesatuan pendapat di kalangan manajemen lembaga pers dimana wartawan peliputan selidik bekerja. Hal ini banyak berkaitan dengan risiko tanggung jawab yang pada akhirnya harus ditanggung.
4. Biasanya peliputan selidik juga menyangkut *“paket promosi”* dari media massa sebagai satu bagian dari wujud pers industrialis.
5. Biasanya peliputan selidik akan memanfaatkan pula foto dan ilustrasi guna mempermudah pemahaman masyarakat untuk menerima sesuatu yang sulit diterima akal, atau dengan kata lain mengungkap fakta, data, dan informasi dengan berbagai cara agar hasil liputan menjadi akurat dan lengkap.
6. Biasanya para redaktur dan penanggungjawab peliputan selidik lebih melibatkan wartawan terbaiknya, karena kegiatan ini senantiasa dianggap berisiko dan memerlukan kreativitas tinggi.

Al Hester dalam serangkain catatannya itu paling tidak menyiratkan bahwa mereka yang terlibat dalam peliputan selidik –wartawan, redaktur, hingga pemimpin redaksi-- senantiasa sepakat bahwa yang mereka kerjakan adalah kerja tim (*team work*) yang penuh risiko yang memeras keringat, menghabiskan waktu dan dana.

Selain itu, peliputan selidik senantiasa mementingkan “proses” dan “hasil” dalam posisi yang sama pentingnya, sehingga mereka yang terlibat harus benar-benar orang yang terlatih bekerja di bawah tekanan (*under pressure person*).

Peliputan selidik di negara berkembang, dalam penilaian Hester, terbuka peluangnya bila temanya berkaitan dengan permasalahan lingkungan hidup –seperti pencemaran, pemanfaatan pestisida, dan kebakaran hutan— ancaman musnahnya kebudayaan pribumi, urbanisasi, kedudukan kaum wanita, serta keluarga berencana.

PELIPUTAN SELIDIK BERETIKA

Wartawan peliputan selidik bernama Brit Hume pada tahun 1973 pernah berkomentar bahwa pekerjaan yang dilakukannya lebih banyak untuk mengungkap sejumlah “kebusukan” berkaitan dengan dusta dan korupsi. “Kebusukan itu harus dibongkar. Demi kepentingan masyarakat umum dan demi kepentingan kita sendiri,” tegasnya.

Dalam upaya mengungkapkan “kebusukan” tersebut, wartawan peliputan selidik pada tahap awal seringkali harus berhadapan dengan “*konflik batin*” akibat “*konflik kepentingan*”. Kepentingan di antara “*kepentingan pribadi*”, “*kepentingan lembaga pers-nya*”, “*kepentingan publik*”, dan “*kepentingan nara sumber.*”

Konflik semacam itu akan dengan mudah muncul, karena wartawan peliputan selidik lebih banyak harus “*membuka sesuatu yang ditutup-tutupi*”. Oleh karena itu, mereka untuk membuka kasusnya seringkali harus mendapatkan informasi mulai dari *cara* “*meminta*”, “*membeli*”, “*memaksa*”, atau bahkan “*mencuri*”-nya.

Berangkat dari pekerjaan semacam itulah, wartawan peliputan selidik dituntut memiliki “*etika di dalam maupun di luar etika*”. Hal tersebut dapat diartikan bahwa mereka harus memiliki kreativitas untuk melakukan kegiatan pencarian data/informasi secara sah, dan bila harus melanggarnya, maka harus pula memiliki kreativitas lain guna menutupinya sekaligus mencari alasan yang jauh lebih cerdas dari kemungkinan tuduhan yang akan datang.

Untuk lebih memahami posisi tugas yang beretika di dalam maupun di luar etika, maka sejumlah wartawan peliputan selidik berpegang ke pendapat Edward R. Murrow:

***“Agar meyakinkan, kita harus dapat dipercaya.
Agar dipercaya, kita harus dapat diandalkan.
Agar diandalkan, kita harus jujur.”***

Sikap “*meyakinkan, dipercaya, diandalkan, dan jujur*” itulah yang sering diperankan oleh wartawan peliputan selidik. Dalam hal ini, mereka biasanya dengan mudah pula menilai apakah nara sumber yang ditemuinya memiliki kredibilitas atau tidak, berkompeten atau tidak, bahkan memiliki informasi penting atau tidak. Hal inilah yang oleh banyak orang disebut bahwa wartawan adalah penonton sekaligus pemain dari karakter kemanusiaan. Apalagi bagi wartawan peliputan selidik.

Dalam memainkan peran yang meyakinkan, dapat dipercaya, diandalkan, dan jujur, maka wartawan peliputan selidik dituntut mampu menempatkan dirinya bukan hanya sekedar “*journalist*” alias pelapor suatu peristiwa atas dasar kejadian/fakta. Namun, ia dituntut pula mampu menempatkan diri sebagai “*agent*” untuk menggali data/informasi penting, sekaligus menjadi “*lobbyist*” yang mampu bergaul dengan nara sumber penting.

Agar posisinya lebih luwes, wartawan peliputan selidik dalam mencari bahan berita/karangan khas/foto juga perlu memahami sejumlah kesepakatan dengan nara sumbernya. Kesepakatan itu antara lain berupa:

1. ***On the Record.*** Dalam hal ini wartawan dapat mengutip semua hal tentang nara sumber dan segala informasi yang dikemukakannya.
2. ***On Background.*** Dalam hal ini wartawan dapat mengutip semua hal menyangkut informasi yang diberikan nara sumber, namun jati diri nara sumber harus benar-benar

dilindungi dengan alasan tertentu. Biasanya, wartawan cukup menyebutkan: “menurut sumber di Departemen X,”

3. ***On Deep Background***. Dalam hal ini wartawan hanya dapat mengutip inti dari informasi yang didapatkan, tanpa dapat mengutip dalam kalimat langsung –dengan tanda kutip—informasi itu. Sementara itu, jati diri nara sumber harus dilindungi.
4. ***Off the Record***. Dalam hal ini wartawan mendapatkan informasi yang sama sekali tidak boleh dipublikasikan dalam bentuk apapun. Bahkan, wartawan tersebut terikat etika untuk tidak mengembangkan informasi yang diduplikatnya itu.

Empat kesepakatan di antara wartawan dengan nara sumbernya itu menjadi bagian etika pers yang senantiasa dijunjung tinggi. Dalam peran penuh “*ikatan*” –demikian wartawan sering menyebutnya—itu dapat diartikan sebagai “*harga mati*”.

Namun demikian, pada perkembangannya banyak wartawan yang justru membatasi dirinya “*hanya menerima kesepakatan nomor satu (On the Record) dan nomor dua (On Background)*”, serta meninggalkan dua kesepakatan berikutnya. Mereka dengan berani langsung mengatakan, “Maaf, saya punya informasi lain” manakala ada nara sumber yang ingin menerapkan kesepakatan ketiga (*On Deep Background*) atau bahkan kesepakatan keempat (*On the Record*).

Mengapa wartawan itu bersikap demikian? Situasi dan kondisi semacam itu dilakukan oleh wartawan peliputan selidik untuk menghindari menerima informasi subyektif yang mengecoh. Oleh karena, kesepakatan untuk membuat berita hanya dengan mengetahui latar belakang tanpa ada nara sumber yang jelas menjadi “*hal tercela, dan mengurangi kredibilitas*” dari kaidah nilai-nilai jurnalistik bagi wartawan profesional. Hal ini pula yang antara lain melatarbelakangi sebagian besar Kantor Berita untuk menghindari publikasi berita tanpa nara sumber yang jelas.

“*Katakanlah kebenaran, tetapi dengan membengkokkannya,*” demikian pendapat Emily Dickinson menanggapi tentang pekerjaan politikus dan petugas hubungan masyarakat. Dan, hal ini pula yang senantiasa diwaspadai oleh wartawan peliputan selidik.

PELIPUTAN SELIDIK BERSASTRA

Dalam manajemen media massa modern ada istilah “*proses dan hasil*” peliputan selidik menempati posisi yang sama penting, karena keduanya adalah rangkaian pekerjaan yang penuh risiko dengan azas “*demi kebenaran pers yang mengutamakan kepentingan publik*”.

Bahkan, di kalangan pers ada guyonan sarkatis: “*Jika saja ada orang lembaga pers yang menilai proses dan hasil pekerjaan peliputan –apalagi peliputan selidik— tidak dalam posisi penting, maka bisa dipastikan dia bukanlah bagian dalam sistem kerja jurnalistik atau bidang keredaksian, atau pun loper yang meneriakkan berita penting di keramaian jalan.*”

Guyonan ala pers itu timbul, antara lain sebagai dampak dari pers industri yang seringkali menempatkan segi menarik keuntungan –sebagai bagian *“hasil kerja”* —menjadi lebih penting dibanding susah payahnya para wartawan –sebagai bagian *“proses kerja”* —berjungkir balik mencari bahan berita/karangan khas/foto.

Selain itu, pers dalam tatanan industri cenderung semakin menempatkan kolom iklan sebagai unsur pendapatan yang menopang kehidupan karyawan di organisasi pers bersangkutan. Padahal, sejarah pers belum pernah mencatat ada media massa khusus iklan, karena pariwisata semacam itu justru hadir bila publik menyukai berita yang disajikan media massa.

Kecintaan publik terhadap media massa, antara lain karena mereka merasa mendapatkan informasi yang tepat, berkaitan dengan kepentingan mereka, ada informasi baru, memberikan hiburan, bahkan berisikan tentang berita-berita yang jujur. Dalam situasi dan kondisi semacam inilah peliputan selidik mendapatkan tempat, bahkan terhormat. Kenapa? Oleh karena, manusia secara naluriah tidak suka dibohongi, sehingga mereka ingin mengetahui rahasia orang lain.

Dalam kondisi penuh persaingan itu pula, wartawan –terutama wartawan liputan selidik—mendapat *“beban”* tambahan, yaitu bagaimana senantiasa dapat bekerja demi kepentingan organisasi media massanya sekaligus membuktikan diri bahwa dirinya sebagai *“orang lapangan”*-lah yang paling tahu tentang makna *“demi kepentingan publik”*.

Bagi wartawan peliputan selidik permasalahan terakhir yang tak kalah rumitnya dengan proses pencarian bahan berita/karangan khas/foto-nya adalah bagaimana menuangkan tulisan dari berbagai informasi penting.

Pola penulisan hasil peliputan selidik cenderung menjadi karangan khas (feature) karena mengutamakan kedalaman, berlatar belakang, dan memeras segala kemampuan berbahasa –terutama memainkan *“diksi”* atau pilihan kata—agar hasil karyanya dapat lebih dicerna publik, sekalipun permasalahan yang dikemukakan relatif rumit.

Banyak orang –termasuk wartawan pemula—beranggapan bahwa peliputan selidik senantiasa bertema dan mengundang permasalahan besar atau mengandung kontroversi, sehingga penulisannya pun lebih sulit.

Padahal, wartawan peliputan selidik akan lebih mudah menulis laporannya dengan lebih mengutamakan permasalahan kecil. Dengan kata lain, mereka justru memilih permasalahan yang terdekat dengan kepentingan umum.

“Think globally, act locally” (berpikir kesejagatan, bertindak lokal). Hal inilah yang lebih sering diikuti oleh wartawan peliputan selidik. Mereka berangkat menggali gagasan penulisan dari permasalahan keseharian, walaupun informasi yang mereka miliki bisa berdampak luas.

Tatkala harus mengemukakan permasalahan berat dengan bahasa ragam jurnalistik, maka wartawan tersebut akan lebih mudah jika mereka memanfaatkan perkalimatan bergaya bertutur, ada anekdot, memainkan alur cerita klimaks dan anti klimaks, sehingga pembaca seakan berhadapan dengan novel yang berangkat dari cerita asli.

Dari gejala semacam itulah, kalangan pers dan sejumlah pengamat mereka menyebut adanya *Jurnalistik Sastra (literacy journalism)*.

Wai Lan J. To yang bekerjasama dengan Albert L. Hester menulis dan menyunting buku bunga rampai "*Handbook for Third World Journalist*" (1987) berpendapat bahwa jurnalistik sastra adalah salah satu upaya sistem pers untuk memperluas ruang lingkup dan keterampilan jurnalistik mereka setelah bergerak ke arah peliputan selidik.

Jurnalistik sastra di AS, menurut dia, dapat ditelusuri sampai ke tahun 1937 manakala Edwin H. Ford menyusun buku bertitelkan "*A Bibliography of Literacy Journalism*" terbitan Burgess Publishing Company, Minneapolis (AS).

Ford mencatat bahwa jurnalistik sastra dapat dirumuskan sebagai tulisan yang masuk dalam "*kawasan senja*" (batas akhir) yang memisahkan sastra dari jurnalisme. "Jurnalisme sastra adalah penghubung surat kabar dan sastra."

Pada gilirannya, masyarakat AS pada era 1960-an menyebut langgam jurnalistik sastra sebagai *Jurnalistik Baru (new journalism)*. Mereka agaknya lupa bahwa sejarah persnya melalui Edwin H. Ford sudah pernah menyebut kaidah yang sama.

Norman Sims dalam buku bunga rampai "*The Literacy Journalists*" terbitan Ballentine Books, tahun 1984, menulis bahwa jurnalistik sastra ataupun jurnalistik baru --seperti disebut pada era 1960-an-- tidak dirumuskan oleh kritikus, namun para penulisnya sendiri sudah menyadari bahwa karya mereka memerlukan pendalaman struktur, "suara", dan ketelitian.

Dalam pengertian yang lebih mudah, pendapat Sims itu menunjukkan bahwa dasar dari jurnalistik sastra tidak berbeda dengan peliputan selidik, yaitu memiliki metoda ilmiah yang bertujuan memaparkan satu permasalahan kepada publik setelah menjalani kajian pembenaran. Kalangan pers mengenal salah satu bagian metoda ilmiahnya adalah "*check and recheck*" (periksa dan periksa lagi).

Secara terpisah, dalam penilaian Wai Lan J. To, di China jenis jurnalistik sastra juga berkembang relatif baik. Masyarakat pers China menyebutnya "*Bao Gao Wen Xue*" (literacy journalism atau jurnalistik sastra).

Sebagaimana di AS, jurnalistik sastra di China juga merupakan proses kreatif para wartawan untuk mengungkap permasalahan yang perlu diketahui oleh publiknya dengan cara penyampaian menggunakan gaya bersastra. "*Mereka menggunakan langgam sastra untuk mengungkapkan fakta aktual bernilai berita,*" catat Wai Lan J. To.

Paling tidak, keberadaan peliputan selidik dan penuturan berlanggam jurnalistik sastra adalah upaya pers untuk memuaskan kepentingan publiknya yang senantiasa haus akan kebenaran dan kejujuran, seperti juga kalimat bijak berikut ini:

“Seiring dengan pers yang bertanggung jawab, harus ada pembaca yang bertanggung jawab.” (Arthur Hays Sulzberger)

“Pers selalu merangsang keingintahuan. Tak seorang pun pernah meletakkannya tanpa rasa kecewa.” (Charles Lamb)

Bahan Pustaka:

- ***Harris, Julian; Leiter, Kelly; Johnson, Stanley: “The Complete Reporter”, MacMillan Publishing Company, New York. 1985.***
- ***Hellwig, Dr.; “Psychologie und Vernehmungstechnik”, Berlin, Germany, 1951.***
- ***Simbolon, Parakitri T.; “Vademekum Wartawan”, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 1997.***
- ***Rivers, William L.; Mathews, Cleve; “Ethics for the Media”, Prentice-Hall, Inc. New Jersey, USA. 1988.***
- ***“Handbook for Third World Journalist”, Henry W. Grady School of Journalism and Mass Communication, The University of Georgia, USA. 1987.***
- ***Peraturan Dasar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), 1995.***